



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Raya Parigi No. ___ Tlp./Fax. (0265) 2641089 Kode Pos 46393
email : setwanpangandaran@gmail.com
website : dprd.pangandarankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/ /SETWAN/2020

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;
- b. bahwa Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
 21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
 22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);
 23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 24 Agustus 2020
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN,



H. YAYAT KISWAYAT

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR :
TANGGAL : 24 Agustus 2020

**PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
 - 1. Sekretariat DPRD
- B. Sistematis Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematis sebagai berikut :
 - I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematis Penulisan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 1.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - IV. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - V. Penutup

C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN,



H. YAYAT KISWAYAT



KATA PENGANTAR

Pujis yukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dapat dilaksanakan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2021. Didalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituanggkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2016–2021.

Adapun penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Parigi, 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN,



Drs. H. YAYAT KISWAYAT, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19631222 198608 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	16
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	16
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	24
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	24
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DKBP3A	25
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V PENUTUP	39



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan uraian di atas. dapat disimpulkan bahwa keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan



penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dimaksudkan untuk :

1. Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun kedepan.



2. Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
3. Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD sebagai dasar penyusunan laporan kerja Sekretariat DPRD yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban dari tugas-tugas kepada Bupati.
4. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah :

1. Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi Sekretariat DPRD.
2. Memberikan Kontribusi dalam penataan Administrasi Kesekretariatan DPRD dalam melaksanakan pembangunan.
3. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan Berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

a) BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan



Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

b) BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

2.4 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.



c) **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.4 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

d) **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

e) **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta penegasan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah pada tahun rencana.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2016 - 2021. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2019 dan Realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat DPRD dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Sekretariat DPRD tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019, pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka Tujuan yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran 2016 - 2021 adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran”**.

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD secara detail dapat dilihat dalam form berikut (TC-29) :



**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan
Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2020
Kab. Pangandaran**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan															
Sekretariat DPRD															
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran													
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim,	8 lembar/paket	3.272 lembar/paket	2.800 lembar/paket	3.272 lembar/paket	117%	2.800 lembar/paket	1.050 lembar/paket	38%					
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	17 rekening	13 rekening	13 rekening	13 rekening	100%	15 rekening	15 rekening	100%					
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang berizin,	26 unit	20 unit	22 unit	20 unit	91%	24 unit	7 unit	29%					
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah SDM Administrasi dan Teknis Perkantoran setiap bulan	19 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	100%	22 Orang	21 Orang	95%					
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	14 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	1 paket	1 paket	100%					
1.6	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah SDM pengaman setiap bulan	30 paket	20 paket	24 paket	20 paket	83%	1 paket	2 paket	200%					
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	Jumlah SDM Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga setiap bulan	40 orang	36 orang	39 orang	36 orang	92%	36 orang	22 orang	61%					
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	55 jenis	55 jenis	55 jenis	55 jenis	100%	55 jenis	20 jenis	36%					
1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	12 jenis	18 jenis	12 jenis	18 jenis	150%	12 jenis	7 jenis	58%					



1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	20	jenis	18	jenis	20	jenis	18	jenis	90%	10	jenis	4	jenis	40%
1.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	54	jenis	26	jenis	26	jenis	26	jenis	100%	9	jenis	9	jenis	100%
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	9	jenis	9	jenis	9	jenis	9	jenis	100%	35	jenis	44	jenis	126%
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan,	3	jenis	1	jenis	3	jenis	1	jenis	33%	3	jenis	8.288	jenis	276267%
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang dibeli,	29.371	Orang	9.830	Orang	8.873	Orang	9.830	Orang	111%	9.776	Orang	5.904	Orang	60%
1.15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah dokumen hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	867	dokumen	157	dokumen	114	dokumen	157	dokumen	138%	289	dokumen	96	dokumen	33%
1.16	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah dokumen hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti,	3.609	dokumen	166	dokumen	98	dokumen	166	dokumen	169%	118	dokumen	60	dokumen	51%
1.17	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi	Jumlah SDM Pengemudi Pimpinan DPRD dan Eselon II	5	orang	5	orang	5	orang	5	orang	100%	5	orang	5	orang	100%
1.18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	4	jenis	4	jenis	4	jenis	4	jenis	100%	4	jenis	4	jenis	100%
1.19	Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Kepala/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang terjamin kesehatannya	120	orang	35	orang	40	orang	35	orang	88%	40	orang	-	orang	0%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik														
2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	7	jenis	7	jenis	7	jenis	7	jenis	100%	7	jenis	2	jenis	29%
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	4	jenis	4	jenis	4	jenis	4	jenis	100%	4	jenis	4	jenis	100%
2.3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	7	jenis	7	jenis	7	jenis	7	jenis	100%	1	jenis	1	jenis	100%
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	3	unit	3	unit	3	unit	3	unit	100%	2	unit	2	unit	100%
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	7	unit	7	unit	7	unit	7	unit	100%	7	unit	7	unit	100%
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara,	15	unit	15	unit	15	unit	15	unit	100%	17	unit	19	unit	112%



2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	12	jenis	12	jenis	12	jenis	12	jenis	100%	13	jenis	9	jenis	69%
2.8	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	4	jenis	4	jenis	0	jenis	0	jenis	0%	14	jenis	0	jenis	0%
2.9	Pengadaan Komputer	Jumlah dan jenis komputer yang dibeli	4	jenis	4	jenis	2	jenis	4	jenis	200%	4	jenis	4	jenis	100%
2.10	Penyediaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang tersedia,	6	unit	2	jenis	1	jenis	2	jenis	200%	3	jenis	1	jenis	33%
	Pembangunan Pos Pengamanan	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100%		paket		paket	
	Rehabilitasi Gedung DPRD dan Paripurna	Jumlah Gedung DPRD dan Paripurna yang dirhab	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100%		unit		unit	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat disiplin aparatur														
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli	590	stel	180	stel	175	stel	180	stel	103%	250	stel	-	stel	0%
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang dibeli	421	stel	111	stel	115	stel	111	stel	97%	133	stel	-	stel	0%
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tuis														
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	26	Orang	-	Orang		Orang		Orang		25	Orang	0	Orang	0%
4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen hasil sosialisasi	5.000	Orang	6.151	Orang	5.000	Orang	6151	Orang	123%	25	Orang	0	Orang	0%
4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti	69	Orang	15	Orang	15	Orang	15	Orang	100%	26	Orang	7	Orang	27%
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik														
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM) yang tersusun	18	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100%	6	dokumen	4	dokumen	67%
5.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	dokumen Laporan Keuangan semesteran yang tersusun	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	1	dokumen	50%
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	dokumen	100%
5.4	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, RKA-P, DPA, dan DPPA) yang tersusun	24	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100%	8	dokumen	7	dokumen	88%



5.5	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	72	dokumen	10	dokumen	12	dokumen	10	dokumen	83%	24	dokumen	6	dokumen	25%
5.6	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang tersusun	72	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	24	dokumen	6	dokumen	25%
	penyusunan Renstra SKPD	jumlah renstra yang tersusun	1	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen			dokumen		dokumen	
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD														
6.1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	30	Raperda	6	Raperda	6	Raperda	6	Raperda	100%	10	Raperda	0	Raperda	0%
6.2	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah dokumen dengar pendapat yang diterima DPRD	78	dokumen	24	dokumen	24	dokumen	24	dokumen	100%	26	dokumen	9	dokumen	35%
6.3	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi	453	dokumen	114	dokumen	149	dokumen	114	dokumen	77%	151	dokumen	105	dokumen	70%
6.4	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang terfasilitasi	231	dokumen	61	dokumen	79	dokumen	61	dokumen	77%	75	dokumen	8	dokumen	11%
6.5	Kegiatan Reses	Jumlah fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	350	dokumen	74	dokumen	75	dokumen	74	dokumen	99%	35	dokumen	0	dokumen	0%
6.6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti anggota DPRD	268	dokumen	60	dokumen	66	dokumen	60	dokumen	91%	188	dokumen	229	dokumen	122%
6.7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah bimtek/workshop yang diikuti anggota DPRD yang terfasilitasi	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali	100%	218	kali	0	kali	0%
6.8	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja luar daerah yang diikuti anggota DPRD	109	dokumen	46	dokumen	109	dokumen	46	dokumen	42%	109	dokumen	3	dokumen	3%
6.9	Penyebarluasan Informasi peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah kerjasama dengan mass media,	12	media	19	media	8	media	19	media	238%	19	media	29	media	153%
6.10	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Jumlah Publikasi Peraturan Daerah melalui Website JDIIH	15	Perda	-	Perda		Perda		Perda		15	Perda	5	Perda	33%
6.11	Kajian Tunjangan Penghasilan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat diform sebagai berikut (T-C 30):



Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah								Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-	%	80	%	80	%	85	%	90	%	95,30	%	97,66	%	100	%	100	%	-
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	-	%	80	%	80	%	85	%	90	%	99,44	%	99,08	%	100	%	100	%	-
3	Persentase Tingkat disiplin aparatur	-	%	100	%	100	%	100	%	100	%	99,58	%	99,89	%	100	%	100	%	-
4	Persentase Tingkat disiplin aparatur	-	%	85	%	90	%	90	%	100	%	90,09	%	96,34	%	100	%	100	%	-
5	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	-	%	100	%	100	%	100	%	100	%	96,05	%	95,42	%	100	%	100	%	-
6	Persentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	-	%	75	%	87	%	89	%	90	%	64,79	%	70,80	%	89	%	90	%	-



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik;
2. Reformasi birokrasi secara terusmenerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan sejenisnya
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang di kehendaki. Akses program dan kegiatan di OPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan;
4. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2020, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan mengenai Peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini(TC-31) :



Review Terhadap RKPD Tahun 2021
Kab. Pangandaran

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan							
PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif Rp.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Sekretariat DPRD			18.098.329.495								51.518.783.406
Umum			9.067.285.552								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Cakupan layanan administrasi perkantoran	90 Persen	5.982.279.530								
penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	-4736, -95 - lembar, - paket	31.624.560	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	-4736, -95 - lembar, - paket	39.500.000
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	17 rekening	462.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	17 rekening	431.400.000
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan yang berizin	25 unit	35.000.000								
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	1 : Jumlah SDM Administrasi dan Teknis Perkantoran setiap bulan	29 Orang	266.000.000								



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DPRD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 : Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	14 Orang	171.299.700									
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1 : Jumlah SDM pengaman setiap bulan	26 Orang	474.368.400									
Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	1 : Jumlah SDM Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga setiap bulan	40 Orang	732.600.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 : Jumlah SDM Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga setiap bulan	40 Orang		1.075.496.349
Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 : Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	55 Jenis	72.765.770									
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 : Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	12 Bulan	120.056.200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 : Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	12 Bulan		69.059.650
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 : Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	20 Jenis	146.410.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 : Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	20 Jenis		63.524.774
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 : Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	26 Jenis	80.525.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 : Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	26 Jenis		232.894.952
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 : Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	9 Jenis	55.635.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 : Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	9 Jenis		110.752.528



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DPRD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 : Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	3 Jenis	187.404.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 : Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	3 Jenis	72.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	1 : jumlah makanan dan minuman yang dibeli	10737 Jumlah	805.255.000								
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 : Jumlah dokumen hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	364 Dokumen	1.794.750.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 : Jumlah dokumen hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	364 Dokumen	1.588.293.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 : Jumlah dokumen hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti	138 Dokumen	292.820.000								
Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi	1 : Jumlah SDM Pengemudi Pimpinan DPRD dan Eselon II	5 Orang	15.000.000								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 : Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	4 Jenis	172.763.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 : Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	4 Jenis	131.390.654
Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Kepala/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD	1 : jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang terjamin kesehatannya	40 Orang	66.000.000	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1 : jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang terjamin kesehatannya	40 Orang	80.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	90 Persen	2.076.899.566								



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DPRD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 : Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	7 Jenis	140.917.568								
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 : Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	4 Jenis	139.807.998								
Pengadaan Mebeleur	1 : Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	7 Jenis	150.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	1 : Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	7 Jenis	88.269.765
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 : Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	204.974.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 : Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	658.852.440
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 : Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	7 Unit	363.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 : Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	7 Unit	331.292.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 : Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	19 Unit	242.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 : Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	19 Unit	377.232.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 : Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Jenis	96.800.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 : Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Jenis	90.800.000



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DPRD

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 : Jumlah Gedung yang direhab sedang/berat	0 Unit	500.000.000								
Pengadaan Komputer	1 : Jumlah dan jenis komputer yang dibeli	4 Unit	60.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 : Jumlah dan jenis komputer yang dibeli	4 Unit	348.558.073
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	1 : Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	14 Jenis	70.000.000								
Penyediaan Gedung Kantor	1 : jumlah gedung kantor yang tersedia	3 Unit	108.900.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 : jumlah gedung kantor yang tersedia	3 Unit	91.950.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 : Tingkat disiplin aparatur	100 Persen	582.082.600								
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 : jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli	250 Stel	338.715.300	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 : jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli	250 Stel	242.525.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 : Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang dibeli	155 Stel	243.367.300								
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 : Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tuisi	100 Persen	233.421.705								
Pendidikan dan Pelatihan Formal				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			66.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DPRD

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 : Jumlah dokumen hasil sosialisasi	30 Dokumen	124.521.705	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 : Jumlah dokumen hasil sosialisasi	30 Dokumen	31.500.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 : Jumlah pegawai yang mengikuti	25 Orang	108.900.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 : Jumlah pegawai yang mengikuti	25 Orang	361.342.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 : Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	100 Persen	192.602.151								
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 : dokumen (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM) yang tersusun	6 Dokumen	6.655.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 : dokumen (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM) yang tersusun	6 Dokumen	464.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1 : dokumen Laporan Keuangan semester yang tersusun	2 dokumen	6.655.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 : dokumen Laporan Keuangan semester yang tersusun	2 dokumen	750.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 : dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	6.655.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 : dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	950.000
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	1 : dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, RKA-P, DPA, dan DPPA) yang tersusun	8 Dokumen	56.572.824	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 : dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, RKA-P, DPA, dan DPPA) yang tersusun	8 Dokumen	45.500.000



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DPRD

Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 : jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	24 Dokumen	55.495.561	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 : jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	24 Dokumen	44.000.000
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	1 : jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang tersusun	24 Dokumen	55.568.766								
Penyusunan Renstra SKPD	1 : Jumlah dokumen renstra yang disusun	1 Dokumen	5.000.000								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan setiap bulan	25 Orang/Bulan	4.225.102.070
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	91 Persen	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan setiap Bulan	40 Orang/Bulan	27.265.660.843
			9.031.043.943								
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 : Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 Persen	9.031.043.943								



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DPRD

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 : Jumlah Perda Inisiatif 10 Perda DPRD	10 Perda	2.514.893.040	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 Persen	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Perda	1 : Jumlah Perda Inisiatif 10 Perda DPRD	10 Perda	2.179.116.110
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1 : Jumlah dokumen dengar pendapat yang diterima DPRD	28 Dokumen	181.500.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 Persen	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 : Jumlah dokumen dengar pendapat yang diterima DPRD	28 Dokumen	206.879.583
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1 : Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi	153 Dokumen	380.847.500	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 Persen	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 : Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi	153 Dokumen	1.613.111.333
Rapat-Rapat Paripurna	1 : Jumlah rapat paripurna yang terfasilitasi	79 Dokumen	390.182.650								
Kegiatan Reses	1 : Jumlah fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	120 Dokumen	1.804.848.100	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 Persen	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	1 : Jumlah fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	120 Dokumen	1.942.788.486
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	1 : Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti anggota DPRD	80 Dokumen	289.985.575	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 Persen	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1 : Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti anggota DPRD	80 Dokumen	600.760.000
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 : Jumlah bimtek/workshop yang diikuti anggota DPRD yang terfasilitasi	4 Kali	1.805.320.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 Persen	Peningkatan Kapasitas DPRD	Bimbingan Teknis DPRD	1 : Jumlah bimtek/workshop yang diikuti anggota DPRD yang terfasilitasi	4 Kali	3.357.876.000



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DPRD

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	1 : Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja luar daerah yang diikuti anggota DPRD	40 Dokumen	1.148.654.210	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 Persen	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 : Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja luar daerah yang diikuti anggota DPRD	40 Dokumen	2.496.381.500
Penyebarluasan Informasi peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1 : Jumlah kerjasama dengan mass media	12 Media	492.640.368	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 Persen	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 : Jumlah kerjasama dengan mass media	12 Media	390.458.400
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	1 : Jumlah Penerbitan Peraturan Daerah	15 Perda	22.172.500	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 Persen	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 : Jumlah Penerbitan Peraturan Daerah	15 Perda	102.815.896



2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kabupaten. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi



Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, maka ditetapkan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran tahun 2020.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Proses pembangunan lima tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini.

3.1.1. Kebijakan Nasional

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara. (PEMERINTAHAN).
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. (PEMERINTAHAN).
3. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. (PEMERINTAHAN).

3.1.2. Kebijakan Provinsi

Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expectation*), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan.

3.1.3. Kebijakan Kabupaten

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kab. Pangandaran Tahun 2020 yang memiliki Tema “*Pencapaian RPJMD Melalui Operasionalisasi RSUD, Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Pemerintahan Menuju Masyarakat Pangandaran Sejahtera Lahir Batin*”, yang diimplementasikan melalui 7 Prioritas, yakni:

1. Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan, Kesehatan, Budaya dan Keagamaan (melalui program operasionalisasi RSUD, PAHE, PKG, JKN dll);
2. Peningkatan Pengelolaan Pariwisata dan Bangkitan Perekonomian Daerah (GSTC, Pertanian, Kelautan, Ketahanan Pangan, Layanan Perizinan dan Investasi);
3. Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan serta Sumber Daya Pendukungnya Bebas Teknologi Informasi;
4. Stabilitas Keamanan, Sosial dan Politik serta Daya Dukung Penyelenggaraan PILKADA (Satpol PP, KESBANG, KPU, BAWASLU);



5. Pembangunan Infrastruktur Dasar Terdiri Dari Jalan Poros Kabupaten, Jembatan, Sarana Permukiman, Sarana Pengairan;
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
7. Dukungan Terhadap Program Dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Desa (Piamari, Bandara, Reaktivasi Ka, Pelabuhan dll).

Kegiatan program strategis tersebut saling bersinergi dalam kesatuan proses, dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Mengacu kepada Visi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai penjabaran dari setiap Misi dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

Dalam mewujudkan Misi yang diinginkan, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu, ***“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD”***

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu ***“Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran”***

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2019 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran yang ingin diwujudkan pada 2016–2021 yaitu mewujudkan “Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia “.

Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2020 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran terdiri dari 6 program dan 51 kegiatan, sebagai berikut :



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	2				SEKRETARIAT DPRD										51.518.783.406	59,246,600,916	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										11,040,410,255	12,696,471,794	
4	2	1	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										45,500,000	52,325,000	
4	02	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, RKA-P, DPA, dan DPPA) yang tersusun	8 Dokumen			45,500,000	52,325,000		
4	2	1	2,02		Administrasi Keuangan										4,690,802,070	5,394,422,380	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan setiap bulan	25 Orang/Bulan			4,225,102,070	4,858,867,380		
4	02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	dokumen (SPIP, LKPJ, SAKIP, LAKIP, LPPD, IKM) yang tersusun jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang tersusun Jumlah SDM jasa administrasi teknis perkantoran Jumlah SDM	6 Dokumen 12 Dokumen 21 Orang 24 Orang			464,000,000	533,600,000		



4	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	jumlah gedung kantor yang tersedia	1 Unit			91,950,000	105,742,500	
4	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jumlah jasa pengemudi kantor yang dibayar tiap bulan Jumlah Kendaraan yang berizin	5 Orang 25 Unit			160.000.000	184,000,000	
4	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	12 Dokumen			44,000,000	50,600,000	
4	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jumlah Paket Jasa Kebersihan	1 Paket			432,843,992	497,770,591	
4	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang dibeli	1 Paket			81,302,357	93,497,711	
4	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	7 Jenis			69,059,650	79,418,598	
4	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	10 Jenis			63,524,774	73,053,490	



4	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Jumlah dan jenis komputer yang dibeli	9 Jenis 25 Unit			232,894,952	267,829,195	
4	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	35 Jenis			110,752,528	127,365,407	
4	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	15000Exemplar			72,000,000	82,800,000	
4	02	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	4 Jenis			131,390,654	151,099,252	
4	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	jumlah makanan dan minuman yang dibeli	10737 Orang			561,350,000	645,552,500	
4	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jumlah dokumen hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	364 Dokumen			1,588,293,000	1,826,536,950	



4	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jenis dan jumlah bahan logistik kantorJumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli yang dibeli	2 Jenis			117.435.715	135,051,072	
4	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jenis dan jumlah bahan aJumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibelilogistik kantorJumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli yang dibeli	4 Jenis			231.122.358	265,790,712	
4	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	3 Jenis			88,269,765	101,510,230	
4	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah Paket Jasa Keamanan	3 Unit 1 Paket			658,852,440	757,680,306	
4	02	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	7 Unit			331,292,000	380,985,800	



4	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	19 Unit			217,232,000	249,816,800	
4	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	13 Jenis			90,800,000	104,420,000	
4	2	1	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								458,842,000	527,668,300		
4	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	25 Orang			66,000,000	75,900,000	
4	02	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jumlah dokumen hasil sosialisasi	8 Dokumen			31,500,000	36,225,000	
4	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	100 %	Jumlah pegawai yang mengikuti	25 Orang			361,342,000	415,543,300	
4	2	2			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN								29,201,297,176	33,581,491,752		
4	2	2	2.01		Layanan Administrasi DPRD								1,613,111,333	1,855,078,033		



4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat paripurna yang terfasilitasi Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi Jumlah SDM Administrasi dan Teknis Perkantoran setiap bulan	79 Dokumen 170 Dokumen 27 Orang			1,613,111,333	1,855,078,033	
4	2	2	2.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							27,588,185,843	31,726,413,719			
4	02	02	2.02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan setiap Bulan	40 Orang/Bulan			27,265,660,843	31,355,509,969	
4	02	02	2.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang dibeli	190 Stel 120 Stel			242,525,000	278,903,750	
4	02	02	2.02	03	Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang terjamin kesehatannya	40 Orang			80,000,000	92,000,000	
4	2	3			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							11,277,075,975	12,968,637,370			
4	2	3	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD							2,179,116,110	2,505,983,526			
4	02	03	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi	90 %	Jumlah Naskah Akademik yg tersusun Jumlah Raperda Jumlah Raperda Inisiatif	4 Raperda 20 Raperda 4 Raperda			2,179,116,110	2,505,983,526	



4	2	3	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD								3,667,571,479	4,217,707,200		
4	02	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 %	Jumlah bimtek/workshop yang diikuti anggota DPRD yang terfasilitasi	236 Orang			3,357,876,000	3,861,557,400	
4	02	03	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 %	Jumlah Publikasi Peraturan Daerah melalui Website JDIIH	24 Perda			102,815,896	118,238,280	
4	02	03	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 %	Jumlah dikumen dengar pendapat yang diterima DPRD	28 Dokumen			206,879,583	237,911,520	
4	2	3	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								2,543,548,486	2,925,080,759		
4	02	03	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 %	Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti anggota DPRD	190 Dokumen			600,760,000	690,874,000	
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 %	Jumlah fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	120 Dokumen			1,942,788,486	2,234,206,759	
4	2	3	2,07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								390,458,400	449,027,160		



4	02	03	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 %	Jumlah kejasama dengan mass media	15 Media Online 15 Media Cetak			390,458,400	449,027,160	
4	2	3	2.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD								2,496,381,500	2,870,838,725		
4	02	03	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	90 %	Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja luar daerah yang diikuti anggota DPRD	120Dokumen			2,496,381,500	2,870,838,725	
TOTAL													51,518,783,406	59,246,600,916		



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dana anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2021 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Parigi, 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN,



Drs. H. YAYAT KISWAYAT, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19631222 198608 1 001